

Peran Literasi Pajak dalam Menurunkan Tingkat Tunggakan PBB oleh Pelaku UMKM

Erimina Halawa^{1*}, Lamsah²

^{1,2}Akuntansi S1, Universitas Pamulang Serang, Jl. Raya Jakarta Km 5 No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183, Indonesia.

E-mail: eriminahalawa1996@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3692>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 24 Nov 2025

Revised: 30 Nov 2025

Accepted: 06 Dec 2025

Kata Kunci:

Literasi Pajak, Pencatatan Keuangan UMKM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kepatuhan Pajak, Pendampingan UMKM.

Keywords:

Tax Literacy, Financial Record-Keeping UMKM, Land and Building Tax (PBB), Tax Compliance, Mentoring UMKM.

ABSTRACT

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi pajak dan kemampuan pencatatan keuangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor produksi yang masih menghadapi rendahnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Rendahnya literasi pajak menyebabkan pelaku UMKM tidak memahami cara menghitung besarnya PBB terutang, jadwal jatuh tempo, prosedur pembayaran, serta konsekuensi dari keterlambatan sehingga memicu tingginya tunggakan pajak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan PKM dirancang melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelatihan satu hari, dan pendampingan selama tiga minggu. Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, simulasi, serta praktik langsung mencatat transaksi keuangan, menyusun buku kas harian, membuat laporan laba rugi sederhana, serta menjalankan simulasi perhitungan dan pembayaran PBB. Pendampingan dilakukan secara daring untuk memastikan peserta konsisten menerapkan teknik-teknik pencatatan yang telah diajarkan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pencatatan keuangan, kesadaran perpajakan, serta kemampuan menghitung dan membayar PBB secara mandiri. Program ini terbukti efektif dalam membangun kebiasaan administrasi yang lebih tertib dan berpotensi mengurangi tunggakan PBB di kalangan UMKM sektor produksi.

This Community Service Program (PKM) aims to improve tax literacy and financial record-keeping skills among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the production sector, who continue to face limited understanding of tax obligations, particularly the Land and Building Tax (PBB). Low tax literacy causes MSME actors to be unable to calculate the amount of PBB payable, understand payment deadlines, follow payment procedures, and recognize the legal consequences of late payments, which in turn contributes to high levels of tax arrears. To address these issues, the PKM activities were designed through three stages: preparation, a one-day training session, and three weeks of mentoring. The training was conducted through lectures, simulations, and hands-on practice in recording financial transactions, preparing a daily cash book, developing a simple income statement, and performing simulations of PBB calculation and payment. The mentoring phase was carried out online to ensure participants consistently applied the financial recording techniques that had been taught. The results of the program show a significant improvement in participants' understanding of financial recording, tax awareness, and their ability to calculate and pay PBB independently. This program proved effective in fostering more disciplined administrative practices and has the potential to reduce PBB arrears among MSMEs in the production sector.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



How to Cite: Erimina Halawa, et al (2025). Peran Literasi Pajak dalam Menurunkan Tingkat Tunggakan PBB oleh Pelaku UMKM, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3692>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun, meskipun memiliki peran strategis, sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dalam pengelolaan administrasi, terutama terkait pencatatan keuangan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah rendahnya literasi pajak pelaku UMKM, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Rendahnya pemahaman mengenai ketentuan pajak, alur pembayaran, manfaat pajak, serta konsekuensi hukum menimbulkan tingginya tingkat tunggakan PBB. Kondisi ini diperburuk oleh masih terbatasnya sosialisasi pemerintah daerah dan minimnya akses UMKM terhadap teknologi administrasi pajak digital seperti e-PBB atau e-Billing.

Di Kota Serang, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM sektor produksi masih melakukan pencatatan keuangan secara manual, bahkan seringkali hanya secara lisan. Akibatnya, pemilik usaha kesulitan mengukur laba bersih, mengatur arus kas, menentukan alokasi dana untuk pajak, serta memahami besaran kewajiban PBB. Kurangnya keterampilan pencatatan keuangan ini berkaitan erat dengan rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Literasi pajak memegang peranan penting dalam membentuk perilaku wajib pajak. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban pajak, cara menghitung, melapor, dan membayar pajak, akan mendorong pelaku UMKM lebih sadar terhadap pentingnya PBB sebagai kontribusi bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan merupakan langkah strategis untuk menurunkan tunggakan PBB.

Berdasarkan urgensi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan untuk meningkatkan literasi pajak UMKM melalui pelatihan pencatatan keuangan, edukasi PBB, serta pendampingan pascapelatihan. Dengan adanya program ini, diharapkan pelaku UMKM mampu menerapkan sistem pencatatan keuangan yang baik, meningkatkan kepatuhan pajak, serta berkontribusi dalam mengurangi tunggakan PBB di Kota Serang.

METODE

Kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan edukatif melalui pelatihan dan pendampingan intensif selama satu bulan. Metode pelaksanaan dibagi menjadi tiga tahapan utama:

Tahap Persiapan (Minggu ke-1)

Kegiatan meliputi:

1. Observasi dan wawancara awal dengan mitra UMKM.
2. Penyusunan modul pelatihan dan materi edukasi pajak.
3. Pembuatan template buku kas harian dan laporan laba rugi sederhana.
4. Koordinasi dengan pemilik usaha dan perangkat daerah pendukung.

Tahap Pelatihan Sehari (Minggu ke-2)

Pelatihan dilaksanakan selama ± 6 jam di lokasi mitra, terdiri atas:

1. Sesi 1: Pencatatan Keuangan dan Kas Harian
Meliputi praktik pencatatan transaksi, penyusunan buku kas, dan laporan laba rugi.
2. Sesi 2: Edukasi Pajak UMKM dan PBB
Meliputi cara menghitung pajak final UMKM 0,5%, cara membuat NPWP, penggunaan e-Billing, serta perhitungan dan pembayaran PBB.
3. Sesi 3: Evaluasi dan Post-test
Peserta dievaluasi melalui latihan pencatatan dan simulasi pembayaran pajak.

Tahap Pendampingan (Minggu ke-3-4)

Pendampingan dilakukan melalui WhatsApp Group dan kunjungan terbatas. Fokus pendampingan meliputi:

1. Monitoring pengisian buku kas harian.
2. Konsultasi terkait perhitungan pajak dan PBB.
3. Evaluasi kesesuaian pencatatan dan pelaporan.

Luaran dari tahap ini berupa:

1. Buku kas harian yang terisi secara konsisten.
2. Laporan keuangan sederhana.

3. Peningkatan pemahaman dan kesiapan membayar PBB tepat waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan dan pendampingan memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman dan perubahan perilaku administrasi pada mitra UMKM. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami cara mencatat transaksi secara sistematis, menyusun buku kas harian, maupun menghitung PBB. Namun, setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:

1. Menyusun buku kas harian dengan format yang benar.
Peserta mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, dan saldo kas secara teratur.
2. Membuat laporan laba rugi sederhana.
Hal ini membantu pelaku usaha memahami struktur biaya dan keuntungan yang diperoleh.
3. Melakukan simulasi perhitungan pajak final UMKM 0,5%.
4. Menghitung dan memahami kewajiban PBB, termasuk:
 - a. Besaran pajak terutang,
 - b. Jadwal jatuh tempo,
 - c. Konsekuensi keterlambatan pembayaran.

Melalui pendampingan, peserta menunjukkan peningkatan konsistensi dalam melakukan pencatatan keuangan. Hal ini menjadi dasar penting bagi kesiapan UMKM dalam memenuhi kewajiban PBB.

Pembahasan menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak melalui pendekatan edukatif terbukti efektif menurunkan potensi tunggakan PBB. Pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat pajak, prosedur pembayaran, serta alokasi dana dari hasil pencatatan keuangan, menjadikan pelaku UMKM lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap kewajiban pajaknya.

SIMPULAN

Program PKM ini berhasil meningkatkan literasi pajak dan kemampuan pencatatan keuangan pelaku UMKM sektor produksi di Kota Serang. Melalui pelatihan dan pendampingan, UMKM menjadi lebih terampil dalam menyusun laporan keuangan dan memahami kewajiban perpajakan, terutama PBB. Peningkatan literasi pajak mendorong UMKM lebih disiplin dalam pengelolaan kas, sehingga risiko tunggakan PBB dapat diminimalkan. Program ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai model edukasi bagi UMKM di daerah lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi & UMKM Kota Cilegon, pemilik UMKM sektor produksi, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral, teknis, maupun fasilitas sehingga kegiatan PKM ini dapat terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- Amanda, O., Viarna, F. A., Sari, I. K., & Saputra, M. R. A. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Tax Moral, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*.
- Ballo, G. M. (2024). Identifikasi Permasalahan Tunggakan PBB di Kabupaten Madiun. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Farikha, N. A. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal. *Prosiding Seminar Nasional*. Tersedia dari: <http://eprints.poltektegal.ac.id/>
- Gunawan, R. I. (2023). Analisis Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ekonomi Daerah*.
- Musfira. (2021). Analisis Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BUMI dan Bangunan (PBB) di Mannanti Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar).

- Patriandari, & Amalia, H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 Pada Bapenda Jakarta Timur Tahun 2020. *Akual Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 48–57.
- Program PkM (2025). Tax Education and Socialization for MSMEs as an Effort to Increase Tax Literacy and Compliance. *Prosiding Pengabdian Masyarakat*.
- Sholekhah, M. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Religiusitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan Sanksi sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Muslim di Kota Salatiga). (Tesis/Skripsi, UIN Salatiga). Tersedia dari: <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id>
- Triansyah, I. (2025). Pengaruh Literasi Pajak dan Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Digital*.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.